



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

UNIT KERJA :
TERTINGGAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DR SAMSUL WIDODO**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **436146**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 10.405.000.000

1. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 849 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 328 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 615 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 348 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/208 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
8. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
9. Tanah Seluas 40 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
10. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
11. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 295.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

280.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 255.046.600

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 338.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.293.046.600

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.293.046.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.